

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada beberapa waktu belakangan ini terdapat tuntutan yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga sektor publik untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas terhadap lembaga sektor publik. Bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah adalah dengan menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah, harus diaudit oleh pihak yang profesional.

Laporan keuangan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan sebagai sarana pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut FASB, dua karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable).

Kedua karakteristik tersebut sangatlah sulit untuk diukur, sehingga para pemakai informasi membutuhkan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan tersebut relevan dan dapat diandalkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan (Arens et al., 2011:4). Profesi akuntan merupakan profesi yang mulia dan sangat terhormat karena pekerjaannya menuntut untuk adanya pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu tugas seorang akuntan adalah melaksanakan pemeriksaan atau audit atas pengelolaan keuangan pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (pasal 24) pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan. Audit dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya penyelewengan. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat penyelewengan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Disampaikan oleh Tim Pusdiklat Pengembangan SDM (2011:41) bahwa, audit atas pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah dapat dilakukan oleh pengawas eksternal, dan pegawai internal. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan

pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falalah, 2005). Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Pengawas eksternal terdiri dari pengawasan oleh DPR, BPK, dan masyarakat. Sedangkan, pengawas internal terdiri dari BPKP, Inspektorat, dan pengawasan atasan langsung. Seperti dijelaskan sebelumnya, pengawasan dapat dilaksanakan oleh pengawas internal yaitu inspektorat, dengan adanya keberadaan inspektorat diharapkan mampu mencegah penyimpangan. Pengawasan intern yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan berfungsi membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, di samping itu pengawasan berfungsi mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah, dkk 2009). Pengguna laporan keuangan menginginkan suatu pengawasan yang berwibawa dan memenuhi norma dan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya peraturan tersebut maka bagi pengguna laporan keuangan atau masyarakat dapat menilai sejauh mana seorang auditor bekerja menjalankan tugasnya yang sesuai dengan Kode Etika APIP dan Standar Audit APIP. Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk auditor, kualitas kerja dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan yang dinilai dari seberapa banyak auditor memberikan respon yang benar dari setiap pekerjaan audit yang diselesaikan (Tan dan Alison, 1999). De Angelo (1981) dalam Badjuri (2012:123) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan suatu kemungkinan dimana seorang auditor menemukan serta melaporkan mengenai adanya suatu pelanggaran yang dilakukan klien dalam sistem akuntansi. Dimana, pelanggaran yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara pernyataan tentang kejadian ekonomi klien dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, kualitas audit berkaitan dengan menemukan dan melaporkan.

Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. (Mulyadi, 2002).

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip Objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. (Mulyadi, 2002).

Akuntabilitas adalah suatu peningkatan dari rasa tanggung jawab, suatu yang lebih tinggi mutunya dari suatu tanggung jawab sehingga memuaskan atasan. Selain itu akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai orang lain karena kualitas performannya menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawab. Akuntabilitas menurut Lessinger, adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan sekolah dengan dana yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardisar dan Sari (2007) mengatakan bahwa kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) yang dimiliki auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

Penelitian Komang Pariardi Arianti dkk,(2014), menyatakan integritas, obyektivitas dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Menurut Ainia Salsabila dan Hepi Prayudiawan (2011) akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor internal. Ayuningtyas Harvita Yulian (2012), Hasbia dan Abdul (2014), Komang dkk, (2015), menyatakan bahwa obyektifitas dan integritas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil audit. Sukriah dkk, (2009) dan Mabruri Winarna, (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa obyektifitas pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan judul: **“PENGARUH INTEGRITAS, OBYEKTIVITAS, DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS AUDIT DI PEMERINTAH DAERAH”**.(Studi Pada Inspektorat Kabupaten Sleman Yogyakarta).

### **1.2. Rumusan Masalah**

- a) Apakah Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah?
- b) Apakah Obyektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah?
- c) Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah?
- d) Apakah integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah?
- e) Seberapa besar pengaruh integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit di Pemerintahan Daerah?

### **1.3. Batasan Masalah**

1. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Inspektorat Kabupaten Sleman Yogyakarta.
2. Integritas dengan indikatornya yaitu Kejujuran auditor, Keberanian auditor, Sikap bijaksana auditor, Tanggung jawab auditor.
3. Obyektivitas dengan indikatornya yaitu Bebas dari benturan kepentingan dan Pengungkapan kondisi sesuai fakta.
4. Akuntabilitas dengan indikatornya yaitu motivasi, kemampuan berpikir, dan keyakinan.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pengaruh integritas terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menganalisis pengaruh obyektivitas terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah.
- c. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah.
- d. Untuk menganalisis pengaruh integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah.
- e. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas terhadap kualitas audi di Pemerintah Daerah.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan bagi penelitian ini adalah :

##### **a. Bagi Akademik**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk bahan acuan penelitian selanjutnya bagi ilmu Akuntansi, khususnya bidang Audit.
2. Menambah keperustakaan dan wawasan bagi pembaca.
3. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bagi kemajuan ilmu akuntansi, yang penulis dapat di bangku perkuliahan.



**b. Bagi Penulis**

1. Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan praktek perusahaan yang sesungguhnya.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
3. Untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam bidang Audit.

**c. Bagi Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Landasan teori dan pengembangan hipotesis berisi tentang teori-teori yang relevan digunakan untuk mendukung proses penelitian, kerangka pemikiran teoritis, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang terdiri dari populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, pemilihan variabel dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

pembahasan menguraikan data dan temuan yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang diuraikan dalam bab III. Uraian mengenai gambaran hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup yang berupa kesimpulan, keterbatasan dan saran.